

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Raihan Maulana Zidan

NIM : 21313064

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2023

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Raihan Maulana Zidan
NIM : 21313064
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti maksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya akan sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Penulis



Raihan Maulana Zidan

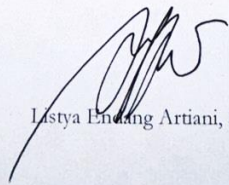
LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa
Tahun 2010-2023

Nama : Raihan maulana Zidan
Nomor Mahasiswa : 21313064
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Listya Endang Artiani, SE.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

analisis faktor faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di pulau jawa tahun 2010-2023

Disusun oleh : RAIHAN MAUALANA ZIDAN

Nomor Mahasiswa : 21313064

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 12 Februari 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Listya Endang Artiani, SE.,M.Si.

Penguji : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan segala karunia-Nya, baik dalam bentuk kesehatan, kekuatan, kesempatan, maupun bimbingan-Nya, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tulus tanpa henti. Kalian adalah pilar utama dalam hidup penulis, yang dengan sabar dan penuh pengertian selalu memberikan semangat dan kekuatan di setiap langkah. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan cinta yang tak terhingga, yang telah menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa bimbingan dan teladan dari kalian, penulis tidak akan bisa berada di titik ini. Semoga karya ini menjadi salah satu bukti kecil dari segala yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kalian.
2. Kepada dosen pembimbing penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa bimbingan pembimbing, karya ini tidak akan terwujud dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2010-2023” yang disusun untuk salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mengakui masih banyak kekurangan dalam menyusun penelitian ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini

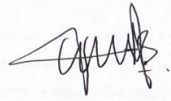
1. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan *support* untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana
5. Kepada Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
6. Kepada Ibu Listya Endang Artiani, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendampingi, memberikan ilmunya serta waktunya sehingga penelitian ini dapat selesai.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada keluarga cjoy yang telah menemani dari awal hingga akhir perkuliahan dan memberikan dukungan selama penyusunan penelitian ini.

9. Kepada faisal dan yovandra yang telah bersedia menemani dan mengajari selama penyusunan penelitian dan belajar ujian komprehensif
10. Kepada semua teman-teman Menuju Rich dan EP Ogah Mundur yang telah menemani penulis selama ini.
11. Kepada Dinda ramadhanty ermas yang telah membersamai saya dan memberikan dukungan dalam menyusun penelitian ini.
12. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar penelitian ini lebih baik lagi. Besar harapan penulis untuk penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu untuk diri penulis maupun para pembaca serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Januari 2025



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 Kemiskinan.....	18
2.2.2 Upah Minimum	19
2.2.3 Inflasi	22
2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	24
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	25
2.2.6 Covid-19.....	27
2.3 Hubungan Antar Variabel Independen Dan Variabel Dependen.....	29
2.3.1 Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	29
2.3.2 Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	30
2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	31
2.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	33

2.3.5 Covid-19 (dummy) terhadap jumlah penduduk miskin	33
2.4 Kerangka Penelitian	35
2.5 Hipotesis Penelitian	36
BAB 3.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Sumber Data	37
3.2 Metode dan Pengumpulan Data.....	37
3.3 Metode Analisis	38
3.3.1 Common Effect:	39
3.3.2 Fixed Effect:.....	39
3.3.3 Random Effect:	39
3.4 Uji Pemilihan Model	39
3.4.1 Uji F / Chow Test (Uji Common Effect vs Uji Fixed Effect)	39
3.4.2 Uji Hausman (Uji Fixed Effect vs Uji Random Effect).....	40
3.5 Uji Statistik.....	40
3.5.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)	40
3.5.2 Uji F (simultan).....	40
3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)	41
BAB 4.....	43
4.1 Deskripsi data penelitian	43
4.2 Hasil uji regresi data panel	45
4.2.1 Pemilihan model	45
4.2.2 Model Regresi Terbaik	46
4.3 Analisis Ekonomi.....	50
4.3.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	50
4.3.2 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	51
4.3.3 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	52
4.3.4 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	52
4.3.5 Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	53
BAB 5.....	54
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Implikasi	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2023	2
Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2023	3
Gambar 1. 3 Inflasi Pulau Jawa Tahun 2010-2023	7
Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2010-2023.....	8
Gambar 1. 5 The Vicious Cycle Of Poverty.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka	12
Tabel 2. 2 Klasifikasi Ketimpangan Gini Ratio.....	21
Tabel 4. 1 Hasil Deskriptif Statistik Variabel.....	43
Tabel 4. 2 Hasil uji chow.....	45
Tabel 4. 3 hasil pengujian fixed effect models (FEM).....	46
Tabel 4. 4 Hasil Koefisien Determinasi	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji F statistik.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Data Penelitian	59
Lampiran II. Hasil regresi common effect	63
Lampiran III. Hasil regresi fixed effect	64
Lampiran IV. Hasil Uji Chow	65
Lampiran V. Deskriptif data penelitian	65

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa, dengan menguji beberapa variabel ekonomi dan sosial. Hipotesis yang diuji meliputi Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, Inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, serta COVID-19 (dengan variabel dummy) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *cross-section* dan *time series*. Data *cross-section* menggunakan 5 Provinsi di Pulau Jawa sedangkan *time series* menggunakan tahun 2010-2023, dan menggunakan data sekunder yang mencakup periode sebelum dan selama pandemi COVID-19 di seluruh provinsi Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel TPT dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sementara itu, upah minimum dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dan pandemi COVID-19 terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk kebijakan pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi.

Kata kunci: Kemiskinan, UMP, Inflasi, TPT, PDRB

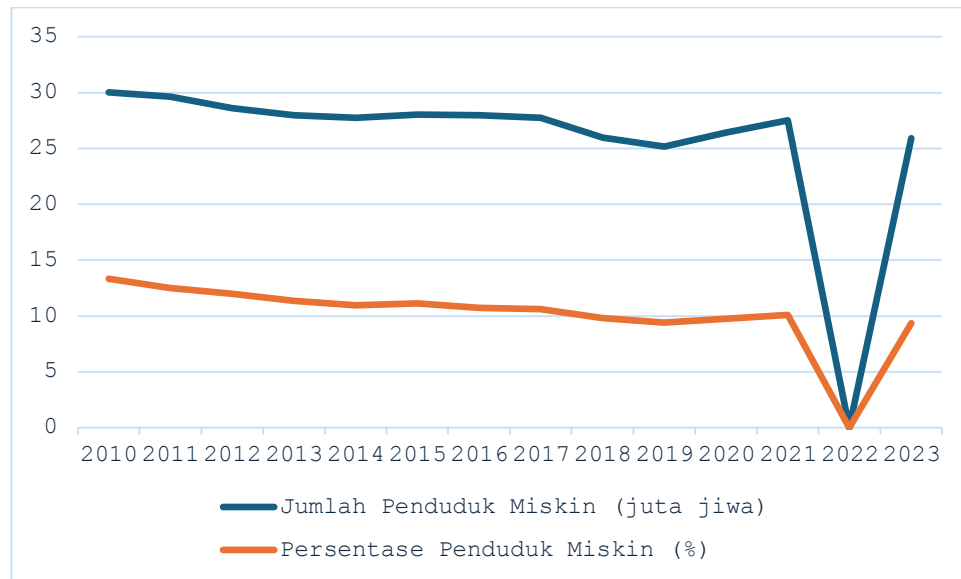
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sejak dahulu hingga sekarang, terutama di negara Indonesia. Kemiskinan juga menjadi salah satu kendala dalam perekonomian karena menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, fisik, dan materi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan jika diukur dari pengeluaran. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pengeluaran perkapita rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458 per kapita perbulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522 atau sebesar 74,21% dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936 atau sebesar 25,79%. (BPS, 2023)

Dalam penelitian Firmansyah dan Ridlwan, (2019). Terdapat beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya tentang stabilitas harga, bantuan sosial, dan program subsidi dana desa (Haryanto, 2017). Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Adanya distribusi pendapatan yang merata merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan.



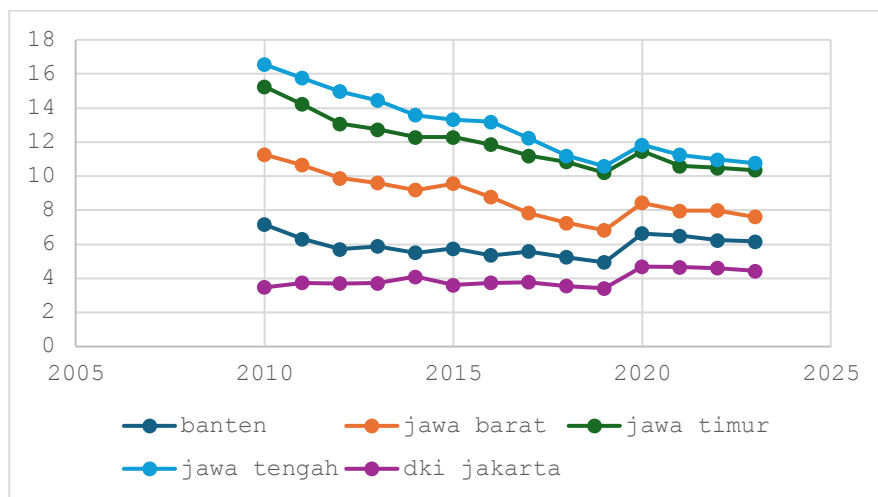
Gambar 1. 1 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2023

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Gambar 1.1 menjelaskan Tingkat kemiskinan negara Indonesia pada tahun 2010-2023. Penurunan kemiskinan 2010-2019 dari tahun ke tahun sebelum pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan yang konsisten. Misalnya, pada tahun 2018 dan menjelang akhir tahun tersebut, persentase penduduk miskin pertama kali menyentuh angka satu digit 9,82% pada tahun tersebut. Kenaikan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sekitar 26,42 juta jiwa 9,78%, dan pada tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 27,54 juta jiwa 10,10%. Pemulihan pasca pandemi 2022-2023 data terbaru menunjukkan bahwa pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 25,90 juta jiwa dengan persentase 9,36%, lebih rendah dari angka pra pandemi pada Maret 2019 yang mencapai 9,41%. Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan efektivitas program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar meskipun negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa

dekade terakhir. Secara keseluruhan, banyak wilayah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, yang menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi akibat keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi dan politik Indonesia, memang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain, namun ketimpangan sosial dan ekonomi antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Jawa tetap terasa. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menawarkan peluang ekonomi yang lebih banyak, sementara daerah-daerah pedesaan di Jawa masih menghadapi masalah kemiskinan struktural, di mana penduduknya bergantung pada sektor pertanian yang rawan terhadap fluktuasi cuaca dan harga komoditas. Meskipun Jawa memiliki akses lebih baik terhadap pembangunan dan infrastruktur, perbedaan signifikan dalam pendapatan dan kualitas hidup antar wilayah tetap mencerminkan adanya kemiskinan yang bersifat relatif, terutama bagi mereka yang tinggal di pinggiran kota atau daerah yang kurang berkembang. Berikut kondisi Tingkat kemiskinan di provinsi yang ada di pulau jawa pada tahun 2010-2023:



Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

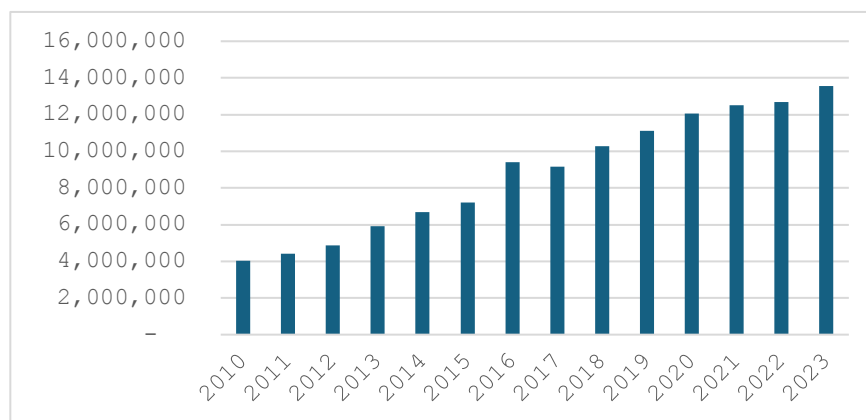
Gambar 1.2 menjelaskan Tingkat kemiskinan 5 provinsi di pulau jawa pada tahun 2010-2023. Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa antara tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan secara umum, meskipun masih terdapat ketimpangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa pada tahun 2010 sekitar 12,1%, dan terus menurun hingga mencapai sekitar 8,4% pada 2023. Provinsi yang memiliki Tingkat kemiskinan tertinggi adalah provinsi jawa timur sebesar 5.356,2 jiwa pada tahun 2011. Jawa timur mempunyai data dalam kemiskinan yang rentan tinggi yang di sebabkan pasca krisis moneter dan pada tahun 2011 terjadi gagal panen di daerah kediri, jawa timur. Dapat kita bandingkan dengan kemiskinan yang ada di daerah perkotaan seperti jumlah penduduk miskin yang di DKI Jakarta pada tahun 2011 sebesar 355,2 jiwa, ketimpangan ini sangat terasa dan tidak merata antara wilayah pedesaan dan perkotaan di tahun yang sama.

Dalam penelitian Ayu, (2018). Meskipun presentase jumlah orang miskin di Provinsi Jawa Timur berubah-ubah dan tidak terlalu signifikan dalam perkembangan, penurunan tingkat kemiskinan ini diharapkan akan berdampak positif pada keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 15,66 persen, pada tahun 2011 sebesar 13,85 persen, pada tahun 2013 hingga 2014 masing-masing sebesar 12,73 persen, 12,28 persen, dan pada tahun 2015 bulan Maret sebesar 12,34 persen, tetapi pada bulan September presentase kemiskinan turun menjadi 12,28 persen. Meskipun presentase kemiskinan turun setiap tahun, presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tetap.

Mengatasi kemiskinan di Pulau Jawa dapat dilakukan dengan salah satu cara yang penting, yaitu melalui penyesuaian upah minimum yang lebih adil antara daerah perkotaan dan pedesaan. Saat ini, perbedaan upah antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa cukup mencolok, di mana upah di kota besar cenderung lebih tinggi, sementara di pedesaan, banyak pekerja, terutama di sektor pertanian dan informal,

yang menerima upah jauh lebih rendah meskipun biaya hidup di daerah tersebut tidak selalu lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan upah minimum yang lebih terjangkau di daerah pedesaan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat dan biaya hidup yang lebih rendah. Peningkatan upah di pedesaan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan, sekaligus membuka peluang bagi sektor ekonomi lain seperti industri kecil dan kerajinan lokal. Dengan demikian, penyesuaian upah minimum yang lebih seimbang antara perkotaan dan pedesaan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh Pulau Jawa.

Dalam penelitian diynna Rahmawati dan sebayang, (2023). Tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum. Untuk memastikan bahwa upah minimum setidaknya memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dalam jangka panjang, konsep upah minimum telah diperkenalkan dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an. Dengan demikian, diharapkan tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga mereka sekaligus meningkatkan produktivitas kerja..



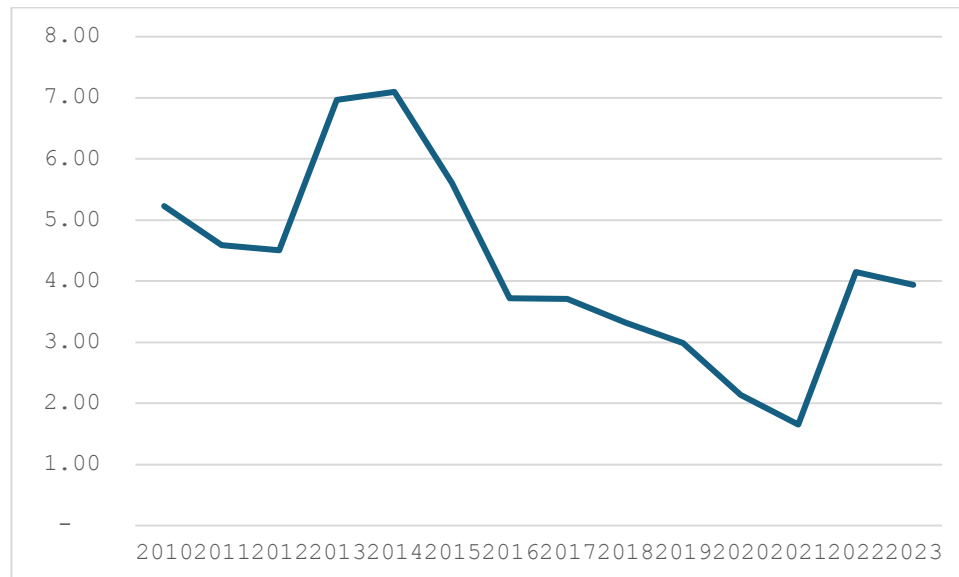
Gambar 1.3 upah minimum pulau jawa tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (data di olah)

Berdasarkan Gambar 1.3 Upah Minimum di Pulau Jawa terus meningkat di setiap tahunnya tetapi peningkatannya tidak terlalu banyak, Upah Minimum di Pulau Jawa dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami kenaikan yang signifikan, meskipun dengan variasi antar provinsi. Pada tahun 2010, Upah Minimum di DKI Jakarta tercatat sekitar Rp1.118.000, sementara provinsi lainnya di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur, memiliki Upah Minimum yang lebih rendah, berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000. Seiring berjalannya waktu, Upah Minimum di DKI Jakarta terus mencatatkan angka tertinggi, bahkan pada tahun 2015 mencapai Rp 2.700.000, berkat peningkatan kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Di sisi lain, Upah Minimum di provinsi lainnya juga mengalami kenaikan, meskipun tidak setinggi Jakarta.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yaitu tingginya inflasi. Masalah jumlah penduduk miskin sering dikaitkan dengan tingginya Tingkat Inflasi. Upaya untuk mengurangi tingkat inflasi dan jumlah penduduk miskin sama pentingnya. Inflasi di Pulau Jawa memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah penduduk di wilayah tersebut, mengingat Pulau Jawa adalah pusat ekonomi, industri, dan perdagangan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sekitar lebih dari 50% dari total populasi nasional.

Dalam penelitian Heydimans, (2018). Dalam ekonomi, inflasi juga merupakan proses penurunan nilai mata uang secara terus-menerus yang disebabkan oleh mekanisme pasar, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, spekulasi, atau bahkan ketidaklancaran distribusi barang. Menurut Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Secara keseluruhan, inflasi dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin dan meningkatkan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.



Gambar 1. 3 Inflasi Pulau Jawa Tahun 2010-2023

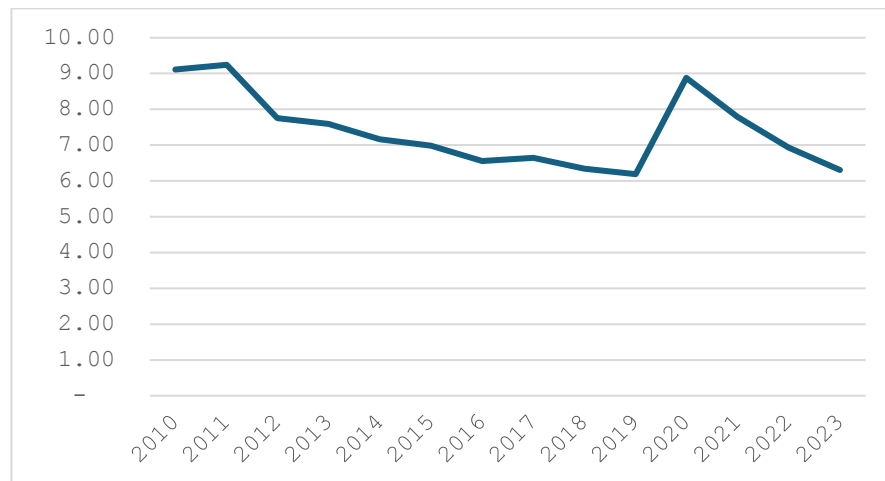
Sumber: Badan Pusat Statistik (data di olah)

Berdasarkan gambar 1.3 diketahui bahwa tingkat inflasi tahunan di Pulau Jawa dari 2010 hingga 2023. Inflasi bervariasi setiap tahun, dengan periode tinggi pada 2013 dan 2014 di atas 5% akibat kenaikan harga energi dan kebijakan pengurangan subsidi. Setelah itu, inflasi mulai menurun hingga 2016, mencapai angka terendah pada 2021 1,65% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan. Setelah pandemi COVID-19 inflasi meningkat kembali, mencapai 4,15% pada 2022 dan 3,94% pada 2023, seiring dengan lonjakan harga komoditas dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Tingginya inflasi berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, di mana semakin banyak individu dan keluarga yang terjatuh dalam lingkaran kemiskinan, khususnya mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi rentan. Sementara itu, inflasi juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, dengan sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah perdesaan atau pinggiran kota yang memiliki akses terbatas terhadap lapangan kerja dan fasilitas dasar. Akan tetapi, dengan Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak kepada penurunan Tingkat pengangguran terbuka yang dimana para lowongan kerja akan mencari tenaga kerja karena banyaknya

permintaan barang dan jasa. Dengan kata lain, ketika tingkat pengangguran rendah, ada banyak kesempatan kerja. Tingkat kemiskinan juga rendah.

Dalam penelitian Yudhistiara, (2022). Jika tingkat pengangguran di suatu negara meningkat, itu menandakan bahwa ekonominya tidak stabil atau kesejahteraan masyarakatnya kurang, dan sebaliknya, jika tingkat pengangguran turun, negara tersebut dianggap sejahtera. Pengangguran adalah masalah ekonomi terbesar di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun yang tetap tinggi dan cenderung berubah-ubah menunjukkan hal ini. Berdasarkan gambar 1.4 diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY terlihat cukup fluktuatif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama empat belas tahun terakhir laju pengangguran yang cukup menonjol yaitu di dalam dua fenomena, fenomena pasca krisis globalisasi dan fenomena pasca COVID-19. Pasca krisis globalisasi tahun 2010-2011 sebesar 9,10% menjadi 9,24% dan tahun 2020-2021 sebesar 8,87% menjadi 7,80% pasca COVID-19 yang membuat perekonomian dunia lesu dan banyaknya para pekerja yang di PHK. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,19%.



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (data di olah)

Selain dengan cara meningkatkan upah minimum, menurunkan inflasi, menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan product domestic regional

bruto PDRB. Produk Domestik Regional Bruto PDRB dan kemiskinan menggambarkan bagaimana kinerja ekonomi suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan. Secara teori, terdapat hubungan yang erat antara peningkatan PDRB dan penurunan kemiskinan. Ketika PDRB suatu daerah meningkat, artinya ekonomi daerah tersebut tumbuh, yang seharusnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, hubungan ini tidak selalu linier atau langsung. Peningkatan PDRB yang tidak diiringi dengan pemerataan ekonomi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, yang justru bisa menyebabkan kemiskinan tetap tinggi meskipun PDRB tumbuh.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah Upah Minimum, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di 5 provinsi yang ada di pulau jawa, Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Pada Tahun 2010-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 2) Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023

- 3) Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 4) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 5) Bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk melakukan analisis pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 2) Untuk melakukan analisis pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 3) Untuk melakukan analisis pengaruh Tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 4) Untuk melakukan analisis pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023
- 5) Untuk melakukan analisis pengaruh Covid-19 terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023

1.3.2 Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Pulau Jawa, Dengan adanya upah minimum yang cukup, diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat berkurang.

- 2) Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Pulau Jawa, Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya hidup, mempengaruhi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.
- 3) Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh TPT terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Pulau Jawa, Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
- 4) Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Pulau Jawa, di harapkan pemerintah memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam pengalokasian anggaran daerah dan pengembangan sektor unggulan.
- 5) Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh Covid-19 terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Pulau Jawa, Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pasca pandemi.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi sebagai acuan dalam menentukan rumusan masalah, variabel, metode penelitian dan teori yang digunakan, beberapa referensi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka

No.	Penelitian dan Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Mahesa, 2022)	• Jumlah penduduk miskin (Y) • IPM (X1) • PDRB (X2) • TPT (X3) • AMH (X4)	Data panel	Variabel PDRB, TPT, dan AMH tidak berdampak pada populasi miskin, dan IPM berdampak negatif pada populasi miskin.
2.	(Handani, 2019)	• Kemiskinan (Y) • Angka harapan hidup (X1)	Random effect	Hasil penelitian menunjukkan variabel rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

		• Rata-rata lama sekolah (X2)		
3.	(Amalia dan utomo, 2023)	• Tingkat kemiskinan (Y) • PDRB (X1) • UMP (X2) • Tingkat pendidikan (X3) • TPT (X4)	Ordinary least square (OLS)	Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB dan orang yang berpartisipasi dalam program keluarga berencana belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, upah minimum telah efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan,
4.	(Salsabila et al, 2022)	• Kemiskinan (Y) • Jumlah penduduk (X1) • IPM (X2) • UMP (X3) • Penyerapan tenaga kerja (X4)	Regresi dan panel	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk, upah minimum, penyerapan tenaga kerja berpengaruh sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
5.	(Sahar, 2024)	• Kemiskinan (Y) • Tingkat Pendidikan (X1) • Inflasi (X2)	Analisis regresi linear berganda	Variabel yang dominan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah adalah variabel independen tingkat pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisiennya yang lebih

				besar dari nilai koefisien variabel inflasi.
6.	(Sinurat, 2023)	• Kemiskinan (Y) • IPM (X1) • Inflasi (X2) • Pengangguran (X3)	model regresi linier berganda Ordinary Least Squares (OLS)	Tingkat kemiskinan di Indonesia terbukti di pengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran sekaligus.
7.	(Sirenden et al, 2017)	• Pertumbuhan ekonomi (Y) • UMP (X1) • Inflasi (X2) • Pengangguran (X3)	metode Ordinary Least Square (OLS)	pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative, upah minimum berpengaruh negatif, pengangguran berpengaruh positif, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan
8.	(Mirawati dan Feriyanto, 2023)	• Lama Pendidikan (Y) • Angka harapan hidup (X1) • Upah minimum (X2)	Data panel	variabel lama pendidikan berpengaruh negatif, variabel angka harapan hidup juga berpengaruh negatif, sedangkan variabel upah minimum berpengaruh positif.
9.	(Annisa dan Sutjicpto, 2017)	• Jumlah penduduk miskin (Y)	Data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah pengangguran, dan PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan, variabel tingkat

		• Pengangguran (X1) • PDRB (X2) • Presentase penduduk tamat SMA (X3)		pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
10.	(Tisniwati, 2012)	• Tingkat kemiskinan (Y) • Jumlah penduduk (X1) • PDRB (X2) • Angka melek huruf (X3) • Angka harapan hidup (X4)	metode analisis regresi berganda	Bahwa ada satu faktor yang dominan paling mempengaruhi tinggi rendahnya angka kemiskinan di Indonesia, yaitu jumlah penduduk miskin yang jumlahnya masih belum merata sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk dalam kegiatan ekonomi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan angka kemiskinan yang layak.
11.	(Manurung dan jaya, 2018)	• Jumlah penduduk miskin (Y) • Pertumbuhan ekonomi (X1) • Pendapatan per kapita (X2) • Inflasi (X3)	metode Ordinary Least Square (OLS), metode regresi linier berganda	variabel-variabel penelitian tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah.

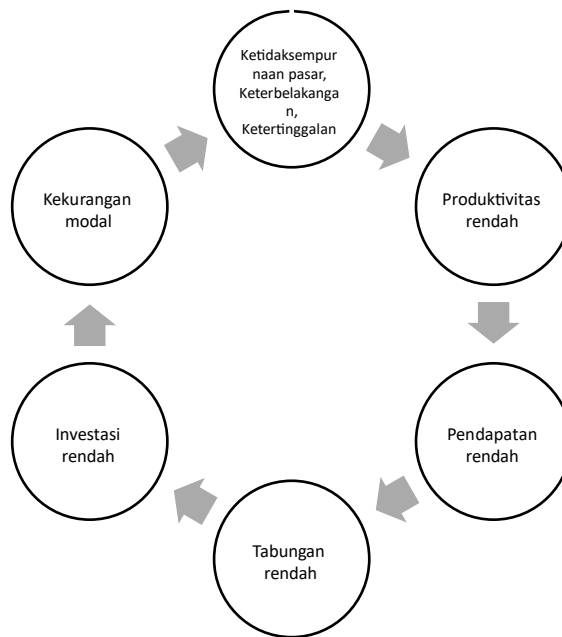
		• TPT (X4)		
12.	(R. oktavia et al, 2024)	• Jumlah penduduk miskin (Y) • Inflasi (X1) • TPT (X2) • Pertumbuhan ekonomi (X3)	Analisis regresi linear berganda	tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi sulawesi utara
13.	(Jumadi dan Hayati, 2022)	• PAD (Y) • Jumlah penduduk (X1) • Konsumsi rumah tangga (X2) • Investasi (X3) • Dummy pandemi covid-19 (X4)	Data panel.	Variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta. Variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta. Variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel dummy pandemi covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta. Artinya ada penurunan pendapatan asli daerah setelah pandemi covid-19.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan tahun penelitian, variabel tambahan, lokasi atau objek penelitian, dan metode penelitian yang di gunakan. Variabel penelitian ini jumlah penduduk miskin, upah minimum, inflasi, tingkat pengangguran terbuka di DIY. Tahun penelitian yang di gunakan pada tahun 2010-2023, sedangkan metode penelitian menggunakan data panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

(Nurkse, 1961) dalam teori "The Vicious Cycle Of Poverty", mengasumsikan awal dari kemiskinan merupakan tingkatan pemasukan per kapita. Dalam teori tersebut, pendapatan yang diterima Masyarakat menunjukkan kemampuan mereka dalam menabung, berinvestasi, dan mempertahankan status mereka. Sedangkan mereka yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kondisi pendapatan yang rendah, Masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya khususnya dalam memutus kondisi lingkaran setan kemiskinan yang terjadi. Berdasarkan teori tersebut, maka Tingkat upah minimum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.



Gambar 1. 5 *The Vicious Cycle Of Poverty*

Sumber: (Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, 1997)

Menurut teori Lingkaran Setan Kemiskinan, penyebab kemiskinan termasuk keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kekurangan modal, yang semuanya menghasilkan produktivitas yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya mengurangi tingkat tabungan dan investasi. Kurangnya modal yang diperoleh menyebabkan sedikit uang untuk disimpan dan diinvestasikan, yang pada gilirannya menyebabkan taraf hidup seseorang menjadi lebih rendah.

Nurkse berpendapat dalam teorinya menyatakan bahwa hambatan dan ketiadaan pembangunan di masa lalu menyebabkan kemiskinan. Intinya dari lingkaran kemiskinan ini adalah kondisi yang dapat menghambat peningkatan pembentukan modal. Tingkat tabungan menentukan pembentukan modal ini.

Dari sudut pandang penawaran modal, lingkaran setan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut: tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung. Akibatnya, suatu negara akan mengalami kekurangan barang modal, yang akan menyebabkan tingkat produktivitas rendah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan saat ini. Meskipun demikian, lingkaran setan kemiskinan yang didasarkan pada permintaan modal memiliki bentuk dan corak yang berbeda-beda di setiap daerah. Karena luas pasar untuk berbagai barang terbatas, perangsang untuk menanam modal rendah di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Produksi yang rendah adalah penyebab pendapatan masyarakat yang rendah, yang ditunjukkan oleh pembentukan modal yang rendah di masa lalu dan akan datang.

2.2.2 Upah Minimum

Upah minimum adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja dengan jumlah sebesar yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah minimum juga diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Secara teoritis, upah minimum dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang dimana hal itu dapat mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin melalui daya beli yang lebih tinggi.

Teori pendapatan dan distribusi pendapatan merupakan konsep fundamental dalam ekonomi yang berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Teori pendapatan menjelaskan bagaimana pendapatan dihasilkan dalam suatu perekonomian melalui kontribusi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Pendapatan yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi ini sering kali terdistribusi secara tidak merata, tergantung pada keterampilan, akses terhadap modal, dan faktor lainnya. Sementara itu, teori distribusi pendapatan membahas bagaimana hasil produksi pendapatan dibagikan di antara anggota masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat memperburuk kondisi kemiskinan, karena kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah atau akses terbatas terhadap sumber daya akan terus berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selain itu, ketidakmerataan pendapatan menyebabkan terjadinya jurang yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan ekonomi yang menekankan pemerataan distribusi pendapatan menjadi sangat penting. Kebijakan seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan, serta penyediaan modal untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat membantu meratakan peluang ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, peningkatan total pendapatan harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong distribusi yang lebih adil agar kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.

Menurut (Badan Pusat Statistik 2015), parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Gini Ratio yang juga sering disebut dengan Indeks Gini atau Koefisien Gini. Gini Ratio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Secara matematis, rumus Gini Ratio dapat disajikan sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(y_i - y_{i1})$$

Keterangan:

GR = Gini Ratio

Pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i

Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i

Pi-1 = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan ke i pada tahun sebelumnya

Yi-1 = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i pada tahun sebelumnya

N = Jumlah Observasi

Menurut Todaro dan Smith, (2015). angka Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai rentang nilai antara nilai 0 (nol) sampai 1 (satu). Gini Ratio yang bernilai 0 (nol) menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata terhadap seluruh unit masyarakat (kemerataan sempurna), sedangkan nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja (ketimpangan sempurna). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin timpang distribusi pendapatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai Gini Ratio berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Ketimpangan *Gini Ratio*

Koefisien gini ratio	Tingkat ketimpangan
< 0,35	Rendah
0,35 – 0,5	Sedang

> 0,5	Tinggi
-------	--------

Sumber: Todaro (2011, 257)

Dalam penelitian Sumarsono (2003) mengemukakan pula bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Pratomo dan Saputra, 2011).

Dalam penelitian lain menurut Sukirno (2008), menyatakan bahwa dalam teori ekonomi pengertian upah dapat didefinisikan sebagai pembayaran jasa-jasa terhadap tenaga kerja yang telah disediakan atas fisik maupun mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa, upah minimum regional dapat diartikan sebagai imbalan atau upah kepada seseorang atas kinerjanya berdasarkan pada wilayah regional yang ditempatinya (Salsabila et al., 2024).

2.2.3 Inflasi

Inflasi memiliki arti kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi berbeda-beda dalam suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu daerah ke daerah lain. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi lebih sering disebut sebagai inflasi. Pada umumnya, indeks harga konsumen (IHK) digunakan untuk mengukur perubahan laju inflasi dari waktu ke waktu. IHK dibuat dengan memperhitungkan jumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Laju inflasi yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat adalah laju inflasi yang menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Angka indeks biasanya dihitung setiap bulan, kuartalan, dan tahunan.

Teori inflasi dan daya beli memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks dampaknya terhadap jumlah penduduk miskin. Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sementara jika pendapatan masyarakat tidak meningkat seiring dengan laju inflasi, daya beli mereka akan menurun. Penurunan daya beli ini akan lebih terasa bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan tetap atau rendah, yang tidak mampu mengikuti kenaikan harga. Dalam jangka panjang, fenomena ini berpotensi menurunkan standar hidup masyarakat, memperburuk kemiskinan, dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan akan semakin terperosok, karena pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan semakin membengkak. Oleh karena itu, untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah, pemerintah dan bank sentral sering kali mengimplementasikan kebijakan moneter yang ketat, seperti meningkatkan suku bunga, serta kebijakan fiskal yang difokuskan pada peningkatan daya beli kelompok-kelompok yang rentan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tantangan besar tetap ada dalam menjaga daya beli agar tidak semakin merosot, sehingga dapat mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin di suatu negara.

Dalam penelitian Hernaningsih, (2018). menurut Dr. Supawi, adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Daya beli masyarakat ini ditunjukkan dengan meningkat atau menurun, dengan daya beli meningkat jika lebih tinggi selama periode dan biaya meningkat dari waktu ke waktu. Daya beli adalah kemampuan seseorang untuk mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa. Daya beli menunjukkan tingkat kesejahteraan yang diperoleh penduduk sebagai akibat dari peningkatan ekonomi. Kemampuan pembeli untuk membeli sejumlah besar barang yang diinginkan pada tingkat pendapatan tertentu, pada suatu pasar tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai daya beli (Putong, 2003:32).

Dalam penelitian Lamatenggo et al., (2019). Menurut definisi tersebut, inflasi dapat terjadi dalam dua cara: kenaikan harga barang secara keseluruhan atau kenaikan harga yang terus menerus (Boediono dan Djohanputro, 2006). Jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga sebagian besar barang lain, kenaikan tersebut tidak dapat dianggap sebagai inflasi. Selain itu, kenaikan harga yang terjadi hanya sekali, bersifat temporer atau musiman, tetapi kenaikan harga yang sangat besar juga tidak dapat dianggap sebagai inflasi.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Teori pengangguran terbuka merujuk pada kondisi di mana individu yang secara aktif mencari pekerjaan dan mampu bekerja, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau kualifikasi mereka. Pengangguran terbuka sering kali terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang siap bekerja, atau karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki individu dengan permintaan pasar tenaga kerja. Fenomena ini memiliki hubungan yang erat dengan jumlah penduduk miskin, karena pengangguran terbuka menyebabkan hilangnya sumber pendapatan yang stabil bagi individu. Tanpa pekerjaan yang layak, individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjebaknya mereka dalam kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti mereka yang memiliki keterampilan rendah atau akses terbatas terhadap pendidikan, lebih rentan terhadap pengangguran. Akibatnya, pengangguran terbuka tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi makro, tetapi juga memperbesar jumlah penduduk

miskin, memperburuk ketidaksetaraan pendapatan, dan menghambat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Penambahan pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja. Semakin banyak pengangguran, semakin tidak produktif masyarakatnya, yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita. Tingkat pengangguran juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Menurut Todaro dan Smith, (2015). pengangguran merupakan kondisi dimana mereka yang merupakan Angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan pengangguran dianggap sebagai akar penyebabnya kemiskinan. Apabila masalah tersebut tidak dapat dikendalikan maka akan mempengaruhi laju perekonomian. Pengangguran juga dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan kekayaan karena peningkatan pengangguran biasanya juga diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan.

Dalam penelitian Simbolon et al., (2024). mengatakan bahwa pengangguran terbuka adalah ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena lebih banyak lowongan pekerjaan daripada orang yang bekerja. Akibatnya, semakin banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dalam perekonomian. Akibatnya, mereka tidak melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama karena kondisi ini. karena mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, sehingga disebut pengangguran terbuka.

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara teoritis merujuk pada nilai total seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah tertentu

misalnya, provinsi, kota, atau kabupaten dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dan mencerminkan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian lokal. Secara umum, PDRB dapat dihitung dengan dua pendekatan utama: berdasarkan produksi dan berdasarkan pendapatan. Teori pendekatan produksi berfokus pada optimalisasi penggunaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, untuk menghasilkan barang dan jasa yang efisien dalam perekonomian. Pendekatan ini menekankan pentingnya produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi guna meningkatkan output ekonomi. Dalam konteks kemiskinan, ketidakmampuan suatu perekonomian untuk mengelola dan mengoptimalkan faktor-faktor produksi dengan baik dapat menghambat terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai dan berkualitas. Ketika tingkat produktivitas rendah atau tidak ada inovasi dalam penggunaan teknologi dan modal, banyak individu yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Hal ini akan berujung pada peningkatan jumlah penduduk miskin, karena ketidakmampuan sektor ekonomi dalam menyediakan pekerjaan yang memadai akan membatasi kesempatan bagi individu untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pendekatan produksi yang efisien dan inklusif sangat penting dalam menciptakan peluang kerja yang lebih banyak dan berkualitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penelitian Nugroho, (2012). Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran dan Indonesia menggunakan pdrb pendekatan pengeluaran. Karena, Pendekatan pengeluaran di Indonesia digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada, seperti sektor pertanian, perikanan, dan energi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan

lapangan pekerjaan dengan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, pengeluaran juga digunakan untuk menanggulangi masalah sosial dan struktural, dengan memberikan akses ekonomi lebih merata kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan miskin. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global serta krisis, seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks penelitian, pengeluaran juga berarti menggali data dan informasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran menjadi strategi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan konvensional didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan yang lebih berfokus pada meningkatkan PDRB provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) biasanya dihitung dengan dua pendekatan sektoral atau lapangan usaha dan sisi penggunaan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan angka PDRB. Selanjutnya, PDRB juga dihitung dengan harga konstan dan harga berlaku. Total PDRB menunjukkan total nilai tambah penduduk selama periode waktu tertentu.

2.2.6 Covid-19

Secara teoritis Covid-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, jenis baru dari kelompok virus korona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada akhir 2019. Virus ini menyebar melalui tetesan udara yang dihasilkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Gejalanya bervariasi, mulai dari demam, batuk, kelelahan, hingga kesulitan bernapas, dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi kondisi serius seperti gagal pernapasan atau kerusakan organ, terutama pada kelompok rentan. Teori ketimpangan sosial menjelaskan bagaimana perbedaan dalam status sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan kesenjangan dalam kehidupan individu atau kelompok masyarakat. Salah satu aspek penting dari ketimpangan sosial

adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, yang berperan signifikan dalam memperburuk kondisi kemiskinan. Masyarakat dengan status ekonomi yang lebih rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas, yang mengakibatkan mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk, pada gilirannya, dapat menghambat kemampuan individu untuk bekerja atau menjalani kehidupan produktif, memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Individu yang berada dalam kondisi kesehatan yang buruk sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, atau jika mereka bekerja, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaan tersebut karena masalah kesehatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ketimpangan sosial dalam hal akses dan kualitas layanan kesehatan berkontribusi pada lingkaran setan kemiskinan, di mana mereka yang sudah miskin menjadi semakin terpinggirkan karena keterbatasan dalam memperoleh perawatan medis yang dibutuhkan untuk menjaga produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Dalam penelitian Indriyani, (2021). COVID-19 tidak hanya menyebar ke manusia, tetapi juga dapat menyebar ke orang yang miskin. Kebanyakan orang menganggap kemiskinan sebagai ketika mereka tidak memiliki cukup uang atau barang-barang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan perawatan medis adalah salah satu definisi kemiskinan. Menurut BAPPENAS dalam BPS (2002), kemiskinan adalah kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu titik yang dianggap manusiawi.

2.3 Hubungan Antar Variabel Independen Dan Variabel Dependen

2.3.1 Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Peningkatan upah minimum secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memberikan mereka kompensasi yang lebih layak. Namun, efeknya bisa membuat menjadi hal yang positif maupun negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa, yang dapat mendorong perekonomian lokal. Sedangkan bisa juga menjadi hal negatif seperti, bisnis mungkin menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan dapat mengurangi daya beli bagi masyarakat miskin yang tidak memperoleh manfaat dari kenaikan upah minimum. Kemudian apabila kita membicarakan terkait dalam pengurangan kemiskinan absolut Pekerja yang berpenghasilan rendah mungkin melampaui garis kemiskinan dengan kenaikan tersebut, mengurangi jumlah penduduk yang tergolong miskin secara statistik. Pengusaha yang tidak mampu menanggung biaya tenaga kerja yang lebih tinggi mungkin akan mengurangi jumlah tenaga kerja, baik dengan memotong jam kerja, memberhentikan karyawan, atau menahan untuk merekrut tambahan tenaga kerja, yang menjadi permasalahan adalah ketika tidak semua pekerja miskin akan mendapat manfaat karena upah minimum sering kali hanya diterapkan pada pekerjaan formal, sementara banyak pekerja miskin berada di sektor informal yang tidak terpengaruh oleh kenaikan ini.

Dalam penelitian Kristanto, (2014). Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk membayar pekerja di tempat kerja mereka. Menurut Kaufman (2000), tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum, termasuk kesejahteraan, kesehatan, dan efisiensi pekerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan Nomor: 13 tahun 2003 menetapkan kebijakan upah minimum di Indonesia. Upah minimum, yang

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 tentang Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah uang yang diberikan secara teratur dan konsisten kepada pekerja, yang dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi tertentu. Upah minimum mungkin berbeda. Upah minimum dapat dibedakan menjadi Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral.

1. Upah Minimum Regional: Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi pekerja dengan tingkat paling rendah yang telah bekerja selama kurang dari satu tahun di wilayah tersebut.
2. Upah Minimum Sektoral: Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektornya.

2.3.2 Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Inflasi memiliki dampak yang kompleks terhadap jumlah penduduk miskin dan seringkali memiliki konsekuensi negatif. Inflasi menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang secara langsung menurunkan daya beli penduduk miskin ketika pendapatan mereka tidak meningkat seiring dengan inflasi. Hal ini memperburuk kondisi kemiskinan karena mereka dapat membeli lebih sedikit dengan pendapatan yang sama. Penduduk miskin juga lebih rentan terhadap peningkatan biaya hidup karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, sehingga perubahan harga ini berdampak lebih besar pada mereka dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Selain itu, inflasi yang tinggi dan tidak menentu dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, memperburuk iklim investasi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan risiko pengangguran. Meski demikian, ada kemungkinan dampak positif dimana inflasi

dapat mengurangi beban riil utang. Bagi mereka yang memiliki utang, nilai riil dari utang tersebut berkurang.

Seiring kenaikan inflasi, kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ini berarti daya beli mereka akan menurun seiring kenaikan inflasi. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel inflasi. Teori bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi, menyebabkan harga barang dan jasa naik, mendukung temuan ini. Daya beli masyarakat menurun sebagai akibat dari kenaikan ini, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan meningkat (Hernaningsih, 2018).

2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Pengangguran Terbuka secara teoritis semakin besar kemungkinan jumlah penduduk miskin meningkat. Hubungan teoritis antara tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan melalui beberapa pilar ekonomi dan sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa banyak individu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber pendapatan membuat mereka terperangkap dalam kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah pekerjaan yang ada menyebabkan pengangguran. Keterampilan dan pendidikan juga berperan dalam hubungan ini; di daerah dengan pengangguran tinggi, individu mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, sehingga sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingginya pengangguran dapat berimbas pada dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya ketidakstabilan sosial dan kriminalitas, yang memperburuk kondisi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi

pengangguran, seperti program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja, hal ini dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengangguran

Dalam penelitian Kristanto, (2014). pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno,1999).

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

- 1) Pengangguran Alamiah Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.
- 2) Pengangguran Friksional Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.
- 3) Pengangguran Struktural Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi.
- 4) Pengangguran Konjungtur Pengangguran Konjungtur adalah Pengangguran yang di sebabkan oleh terjadi nya resesi atau kemunduran di dalam kegiatan ekonomi sehingga terjadinya pengurangan dalam permintaan agregat, penurunan agregat permintaan tersebut mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar sehingga memunculkan pengangguran.

2.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Secara teoritis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan signifikan dengan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. PDRB mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tersebut dalam periode tertentu, mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB diharapkan dapat berhubungan langsung dengan penurunan jumlah penduduk miskin, karena semakin tinggi PDRB, semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan sektor-sektor ekonomi di wilayah itu. Dengan meningkatnya PDRB, biasanya diikuti oleh pertumbuhan sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa, yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita.

Menurut Arsyad (1999), Sering kali digunakan sebagai ukuran pembangunan, pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk membayar biaya pemerintah yang berbeda berkorelasi positif dengan pendapatan per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Dengan tingginya penerimaan di daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi kemiskinan dengan baik di masa depan. (Marginingsih R., 2011).

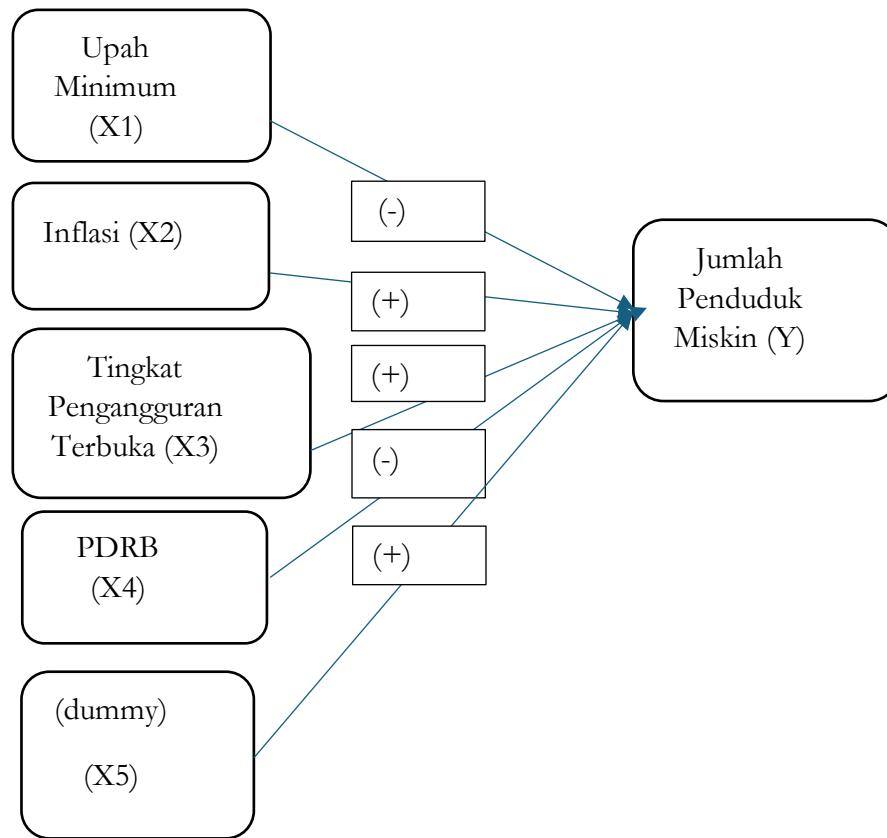
2.3.5 Covid-19 (dummy) terhadap jumlah penduduk miskin

COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui dampaknya pada perekonomian dan kesejahteraan sosial. Pandemi menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada interaksi sosial, seperti pariwisata, perdagangan, dan industri. Akibatnya, banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja atau bahkan tutup, yang meningkatkan pengangguran dan menurunkan

pendapatan, terutama di kalangan masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal. Selain itu, pandemi memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, karena kelompok miskin yang sudah rentan menjadi lebih sulit bertahan akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan sosial. Peningkatan pengangguran struktural dan hilangnya pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan, mendorong lebih banyak individu yang sebelumnya berada di ambang garis kemiskinan jatuh ke dalam kemiskinan. Secara keseluruhan, COVID-19 memperburuk kondisi kemiskinan dengan mempercepat penurunan pendapatan dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, yang menjadikan pengentasan kemiskinan lebih sulit dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan penelitian Farouq Ishak (2021) yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang cukup besar pada pendapatan asli daerah pemerintah provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah diumumkan kasus pertama Covid-19 (Jumaidi dan Hayati, 2022).

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian di atas menggambarkan pengaruh variabel independen Upah Minimum, Inflasi, TPT, PDRB, COVID-19. Dimana kerangka penelitian ini berdasarkan hipotesis yang menggambarkan Upah minimum dan PDRB berpengaruh negatif sedangkan inflasi, TPT dan covid berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

- 1) Diduga upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.
- 2) Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.
- 3) Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.
- 4) Diduga produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.
- 5) Diduga pandemi covid-19 berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder, data sekunder merupakan data yang didapat dan telah diproses dari pihak lain dalam bentuk yang sudah diolah dan sudah dipublikasikan oleh pihak lain. Data panel juga digunakan dalam penelitian ini yaitu gabungan dari *time series* dan *cross section* dari tahun 2010-2023 pada provinsi di pulau jawa. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh meliputi:

- 1) Data mengenai Jumlah Penduduk Miskin (JIWA) yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2023.
- 2) Data mengenai Upah Minimum (Rp.) yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2023.
- 3) Data mengenai Inflasi (%) yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2023.
- 4) Data mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (%) yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2023.
- 5) Data mengenai produk domestik regional bruto (PDRB) (juta) yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2023.
- 6) Data mengenai Covid-19 (%) yang didapat dari variabel dummy tahun 2010-2023

3.2 Metode dan Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Periode data dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2023. Sebagai pendukung dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari badan pusat statistik (BPS), penelitian skripsi sebelumnya, jurnal-jurnal, buku-buku, dan menggunakan internet selain dari data sekunder.

3.3 Metode Analisis

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai Model estimasi. Data panel merupakan metode regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*, menurut (Widarjono, A, 2007). Memiliki beberapa keuntungan dengan menggunakan metode regresi data panel, yakni mampu memberikan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* lebih besar serta mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi penghilangan variabel. Ada tiga metode dalam melakukan regresi panel data diantaranya adalah *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 \log X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan:

i = banyaknya unit observasi

t = banyaknya waktu

Y = Jumlah Penduduk Miskin

X₁ = Upah Minimum

X₂ = Inflasi

X₃ = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

X₄ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X₅ = Pandemi Covid-19 (Dummy)

e_{it} = Error

Untuk melakukan estimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik model yang sering digunakan, yaitu:

3.3.1 Common Effect:

Metode *Common Effect* menggabungkan data *time series* dan *cross-section*, dan metode OLS dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel. Metode ini tidak mengutamakan aspek individu atau waktu. Perilaku data antar perusahaan dianggap identik sepanjang waktu.

3.3.2 Fixed Effect:

Salah satu Teknik yang menggunakan variabel *dummy* untuk melihat perbedaan intersep adalah dengan metode *fixed effect*. Pendekatan ini membuat asumsi bahwa meskipun intersep tidak tergantung pada waktu, koefisien regresi, atau kemiringannya, stabil di seluruh bisnis dan waktu.

3.3.3 Random Effect:

Metode *Random Effect* menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin muncul pada hubungan antar waktu dan kabupaten/kota. Metode OLS tidak dapat menghasilkan estimator yang efektif, sehingga metode *Generalized Least Square* (GLS) adalah pilihan yang lebih baik.

Setelah tiga metode tersebut ditemukan estimasi model regresinya, pengujian harus dilakukan untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk digunakan dalam regresi data panel. Tiga uji yang dilakukan adalah:

3.4 Uji Pemilihan Model

3.4.1 Uji F / Chow Test (Uji Common Effect vs Uji Fixed Effect)

Uji F membandingkan dua regresi untuk menentukan apakah metode regresi data panel yang menggunakan efek tetap lebih baik daripada model efek umum. Metode untuk menentukan mana yang paling efektif untuk melihat *total residual squared* (Agus, 2007).

3.4.2 Uji Hausman (Uji Fixed Effect vs Uji Random Effect)

Setelah pengujian selesai, harus diputuskan mana model yang paling cocok antara metode OLS dengan Efek Tetap dan metode OLS dengan Efek Tanpa Efek. Selanjutnya, harus dilakukan jika hasil uji kedua metode tersebut lebih baik daripada metode OLS. Salah satunya adalah dengan memeriksa apakah ada korelasi antara kesalahan term dan variabel independen X. Jika terbukti ada korelasi, model efek acak akan dianggap sebagai model terbaik; jika statistik uji Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, hasilnya akan menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, model efek tetap akan dianggap sebagai model terbaik dan sebaliknya. (Agus, 2007)

3.5 Uji Statistik

3.5.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Uji determinasi adalah uji yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen secara Bersama sama mempengaruhi variabel dependen, yang dilihat dari nilai *adjusted R – Squared*. Ghozali, I. (2016). Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol sampai satu. Semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi, maka variabel independen lebih dapat menjelaskan variabel dependen.

3.5.2 Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau hanya untuk mengukur pengaruh total dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi F di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, atau sebaliknya (Ghozali, 2016). Hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, yang artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T ini digunakan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai P-Value lebih kecil dari α (5%) maka terdapat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Namun, jika nilai P-value lebih besar dari α (5%) maka tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hipotesis uji T dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_0: \beta = 0$, tidak ada Pengaruh antara Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

$H_1: \beta > 0$, terdapat Pengaruh antara Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin

- 2) Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_0: \beta = 0$, tidak ada Pengaruh antara Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_1: \beta < 0$, terdapat Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

- 3) Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_0: \beta = 0$, tidak ada Pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_1: \beta < 0$, terdapat Pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin

- 4) Pengaruh Product Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin

H0: $\beta = 0$, tidak ada Pengaruh antara Product Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin

H1: $\beta > 0$, terdapat Pengaruh antara Product Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin

5) Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Jumlah Penduduk Miskin

H0: $\beta = 0$, tidak ada Pengaruh antara Pandemi Covid-19 terhadap Jumlah Penduduk Miskin

H1: $\beta > 0$, terdapat Pengaruh antara Pandemi Covid-19 terhadap Jumlah Penduduk Miskin

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi data penelitian

Data ini menggunakan data yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang di gunakan selama empat belas tahun, dari tahun 2010 hingga 2023 yang merupakan data dari lima provinsi di pulau jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari variabel Upah Minimum, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan Covid-19 (Dummy) terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa.

Deskripsi data statistik penelitian ini berisi tentang mean, median, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Tabel dibawah ini menunjukan hasil deskriptif statistik variabel.

Tabel 4. 1 Hasil Deskriptif Statistik Variabel

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. deviasi
Jumlah penduduk miskin	2873.92	3908.700	5529.300	355.2000	1937.577
UMP	1769008.	1602698.	4901798.	630000.0	1007243.
INFLASI	4.256738	4.063333	8.435000	1.409167	1.804805
TPT	7.392857	7.335000	13.68000	3.820000	2.359970
PDRB	2.52E+08	1746542.	1.10E+09	906685.8	3.51E+08
DUMMY	0.214286	0.000000	1.000000	0.000000	0.413289

Sumber : Lampiran V

Berdasarkan tabel 4.1 yang menunjukkan nilai *mean*, nilai *median*, nilai *max*, nilai *min* dan nilai standar deviasi untuk setiap variabel dependen dan independen. Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil deskripsi data statistik nilai rata-rata jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 2873,92%. Nilai tengah jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa sebesar 3908,700%. Nilai maksimum upah minimum di Pulau Jawa sebesar 5529,300% sedangkan nilai minimumnya sebesar 355,2000% dan nilai standar deviasi sebesar 1937,577%.
2. Hasil deskripsi data statistik nilai rata-rata upah minimum di Pulau Jawa sebesar Rp. 1.769.008. Nilai tengah upah minimum di Pulau Jawa sebesar 1,602698. Nilai maksimum upah minimum di Pulau Jawa sebesar Rp. 4.901.798. sedangkan nilai minimumnya sebesar Rp. 630.000. dan nilai standar deviasi sebesar 1,007243.
3. Hasil deskripsi data statistik nilai rata-rata inflasi di Pulau Jawa sebesar 4,256738%. Nilai tengah inflasi di Pulau Jawa sebesar 4,063333%. Nilai maksimum investasi di Pulau Jawa sebesar 8,435000% sedangkan nilai minimumnya sebesar 1,409167% dan nilai standar deviasi sebesar 1,804805%.
4. Hasil deskripsi data statistik nilai rata-rata TPT di Pulau Jawa sebesar 7,392857%. Nilai tengah TPT di Pulau Jawa sebesar 7,335000%. Nilai maksimum TPT di Pulau Jawa sebesar 13,68000% sedangkan nilai minimumnya sebesar 3,820000% dan nilai standar deviasi sebesar 2,359970%.
5. Hasil deskripsi data statistik nilai rata-rata PDRB di Pulau Jawa sebesar 2,52E+08%. Nilai tengah PDRB di Pulau Jawa sebesar 1,746542%. Nilai maksimum PDRB di Pulau Jawa sebesar 1,10E+09% sedangkan nilai minimumnya sebesar 9,06685.8% dan nilai standar deviasi sebesar 3,51E+08%.
6. Hasil deskripsi data statistik nilai rata-rata DUMMY di Pulau Jawa sebesar 0,214286%. Nilai tengah DUMMY di Pulau Jawa sebesar 0,000000%. Nilai

maksimum DUMMY di Pulau Jawa sebesar 1,000000% sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,000000% dan nilai standar deviasi sebesar 413289%.

4.2 Hasil uji regresi data panel

Metode regresi data panel terdiri dari 3 model yaitu, *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Langkah yang diperlukan untuk mengetahui hasil estimasi terbaik perlu dilakukan uji data panel dengan menggunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman*.

4.2.1 Pemilihan model

1. Uji chow

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Berikut hasil Uji *Chow*:

Tabel 4. 2 Hasil uji chow

Effect Test	Statistic.	d.f.	Prob.
Cross-section f	189.965744	(4,60)	0.0000
Cross-section Chi-square	183.035486	4	0.0000

Sumber: Lampiran IV

Berdasarkan dari tabel dapat diketahui nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$ maka menolak H_0 yang berarti bahwa model yang tepat digunakan yaitu model *Fixed Effect Model*.

4.2.2 Model Regresi Terbaik

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas maka dapat diketahui bahwa model terbaik yang dapat digunakan guna melakukan analisis yaitu model regresi *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. 3 hasil *pengujian fixed effect models (FEM)*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37785.20	7266.953	5.199593	0.0000
LOG (UMP)	15.84319	291.4144	0.054367	0.9568
INFLASI	-13.60879	20.71721	-0.656884	0.5138
TPT	-138.7372	35.38295	-3.921018	0.0002
LOG (PDRB)	-2061.309	641.6270	-3.212629	0.0021
DUMMY	359.7072	105.6136	3.405881	0.0012
Effect Specification				
Cross-section fixed (dummy variabel)				
R-squared	0.986037	Mean dependent var	2873.921	
Adjusted R-squared	0.983943	S.D. dependent var	1937.577	
S.E. of regression	245.5238	Akaike info criterion	13.97623	
Sum squared resid	3616917	Schwarz criterion	14.29744	
Log likelihood	-479.1680	Hannan-Q uinn criter	14.10382	
F-statistic	470.7938	Durbin-watson stat	0.827285	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran III

Jumlah penduduk miskin umumnya tidak dilog karena ada beberapa alasan penting terkait dengan interpretasi dan sifat data tersebut. Berikut adalah alasan mengapa jumlah penduduk miskin tidak biasanya dilog karena Jumlah penduduk miskin adalah variabel yang memberikan gambaran nyata tentang jumlah orang yang terpengaruh oleh kemiskinan di suatu wilayah. Menggunakan log pada variabel ini akan mengubah interpretasi menjadi perubahan relatif, yang bisa membuat angka absolutnya lebih sulit dipahami atau tidak relevan dalam konteks kebijakan sosial atau ekonomi. Pemerintah dan pembuat kebijakan lebih tertarik pada jumlah orang miskin yang sebenarnya, bukan perubahan relatifnya.

4.2.2.1 Koefisiem Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Investasi, IPM, TPT dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel dependen Kemiskinan maka digunakan analisis koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 4. 4 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.986037
Adjusted R-squared	0.983943

Sumber : Lampiran III

Berdasarkan dari tabel dapat diketahui nilai *R-Square* sebesar 0,985261 yang berarti dalam penelitian ini variabel independen yaitu upah minimum, inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan PDRB dapat menjelaskan variabel tingkat kemiskinan sebesar 98,52% serta untuk 1,48% di jelaskan menggunakan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2.2.2 Uji Analisis F statistik

Uji analisis F statistik untuk menguji apakah terdapat pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan.

Tabel 4. 5 Hasil Uji F statistik

F-statistik	470.7938
Prob (F-statistik)	0.000000

Sumber : Lampiran III

Dapat diketahui dari tabel hasil regresi di atas bahwa nilai *P-value* sebesar $0,000000 < 0,05$ yang berarti signifikan menolak H_0 . maka dapat diartikan bahwa variabel independen upah minimum, inflasi, TPT, PDRB secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jumlah penduduk miskin.

4.2.2.3 Uji Analisis T statistic

Uji analisis distribusi t statistik dapat digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil uji t:

1. Variabel Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_0 : \beta_0 = 0$ Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

$H_a : \beta_1 < 0$ Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun 2010-2023.

Variabel Upah Minimum memiliki nilai probabilitas sebesar $0,9568 < 0,05$ maka gagal menolak H_0 sehingga variabel Upah Minimum tidak berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar 15,84319 Upah Minimum berpengaruh

positif terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2010-2023.

2. Variabel Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

$H_0 : \beta_0 = 0$ Inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

$H_a : \beta_1 < 0$ Inflasi berpengaruh negatif terhadap terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

Variabel Inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar $0,5138 > 0,05$ maka gagal menolak H_0 sehingga variabel Inflasi tidak berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar $-13,60879$ inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2010-2023.

3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap jumlah penduduk miskin

$H_0 : \beta_0 = 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

$H_a : \beta_1 > 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

Variabel TPT memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$ maka menolak H_0 sehingga variabel TPT berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar $-138,7372$ TPT berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin tahun 2010-2023.

4. Variabel Product Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin

$H_0 : \beta_0 = 0$ Product Domestic Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

$H_a : \beta_1 < 0$ Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

Variabel Product Domestic Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0013 > 0,05$ maka menolak H_0 sehingga variabel Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar -2061,309 Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2010-2023.

5. Variabel Covid-19 terhadap jumlah penduduk miskin

$H_0 : \beta_0 = 0$ Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

$H_a : \beta_1 > 0$ Pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010-2023.

Variabel Pandemi Covid-19 memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0012 < 0,05$ maka menolak H_0 sehingga variabel Pandemi Covid-19 berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar 359,7072 Pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap variabel jumlah penduduk miskin tahun 2010-2023.

4.3 Analisis Ekonomi

4.3.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas upah minimum sebesar 0,9568 dan nilai koefisien 15,84319. Artinya variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika nilai upah minimum mengalami kenaikan sebesar

1% maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 15,84319%. Penelitian ini juga sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon, (2022) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000 – 2019” yang menyatakan upah minimum di Indonesia secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.

4.3.2 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas inflasi sebesar 0,9734 dan nilai koefisien -0,748269 Artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika nilai inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,748269%. Penelitian ini juga sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noreen, (2020). Berdasarkan hasil analisis, inflasi memiliki hasil yang tidak signifikan terhadap Tingkat jumlah penduduk miskin yang berarti bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan karena penduduk miskin tidak memiliki daya beli, sehingga apabila terjadi inflasi yang rendah maupun tinggi, penduduk miskin tetap kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

4.3.3 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Tingkat pengangguran sebesar 0,0009 dan nilai koefisien -112,9922 Artinya variabel Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika nilai Tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 112,9922%. Penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Masjkuri (2018), yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berdampak negatif dan signifikan terhadap jumlah orang miskin. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mampu berkorelasi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin melalui penurunan jumlah penganggur sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima

4.3.4 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas PDRB sebesar 0,0157 dan nilai koefisien -1626,721 Artinya variabel PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 1626,721%. Penelitian ini tidak

sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaban, (2020). yang memberikan hasil bahwa variabel PDRB negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera utara. Pemerintah Sumatera Utara harus melakukan pemerataan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk merata ke semua golongan miskin di Provinsi Sumatera Utara, menerapkan pembangunan yang berfokus pada pemerataan produk hasil ekonomi ke seluruh penduduk, dan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB di setiap sektor lapangan usaha dengan menggunakan semua potensinya.

4.3.5 Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Covid-19 (Dummy) sebesar 0,0069 dan nilai koefisien -350,7112 Artinya variabel Covid-19 (Dummy) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di pulau jawa. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah penduduk miskin sesudah adanya pandemi covid-19 mengalami peningkatan dari sebelum adanya pandemi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Setyadi, (2021) yang memberikan hasil bahwa variabel covid-19 berpengaruh Menurut hasil regresi, jumlah kasus COVID-19 berkontribusi positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ini karena fakta bahwa semakin banyak atau lebih banyak kasus yang dikonfirmasi COVID-19 berarti semakin banyak kemiskinan di negara tersebut.

BAB 5

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan penulis mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa” maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah penduduk miskin di pulau jawa tidak dipengaruhi oleh upah minimum.
2. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah penduduk miskin di pulau jawa tidak akan dipengaruhi oleh inflasi.
3. Variabel Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di pulau jawa akan dipengaruhi oleh Tingkat pengangguran.
4. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di pulau jawa akan dipengaruhi oleh PDRB.
5. Variabel covid-19 (Dummy) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin di pulau jawa akan dipengaruhi oleh covid-19.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan penulis mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2022” maka menghasilkan implikasi sebagai berikut:

1. Upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan upah minimum saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pekerjaan dan kesempatan kerja, serta memperbaiki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak.
2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa. meskipun harga barang naik atau turun, itu tidak langsung mempengaruhi orang miskin jika mereka tidak punya pekerjaan yang baik atau akses ke layanan dasar. Oleh karena itu, untuk pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan bantuan sosial, bukan hanya mengendalikan inflasi.
3. TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa. Oleh karena itu, Pemerintah harus menekan Tingkat pengangguran supaya lebih banyak orang yang akan memiliki penghasilan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja itu sangat penting.
4. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan PDRB yang bertujuan untuk membuat perekonomian daerah berkembang, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan

meningkatkan pendapatan Masyarakat yang membuat jumlah penduduk miskin menurun.

5. Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di pulau jawa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan sosial, memperluas bantuan bagi kelompok rentan, dan fokus pada pemulihan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan harus diperluas, serta sistem kesehatan dan jaminan sosial diperkuat untuk memastikan kelompok miskin mendapatkan perlindungan yang memadai. Semua ini penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pemulihan kesejahteraan penduduk miskin di Pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis Edisi Ke Dua*. Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi Uii.
- Ayu, D. S. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ipm, Jumlah Penduduk Dan Upah Minimum Terhadap*. Universitas Islam Indonesia.
- Firmansyah, M., & Ridlwan, A. A. (2019). Pengaruh Dana Zakat Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 79–85. [Http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jei/](http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jei/)
- Hernaningsih, F. (2018). . Pdf. (2018). Pengaruh Kestabilan Inflasi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal M-Progress*, 130–141.
- Heydimans, N. , Dan R. D. (2018). "Analisa Pengaruh Inflasi Terhadap Kredit Konsumtif. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1. [Www.Blogspot.Com](http://www.Blogspot.Com),
- Indriyani, L., & Setyadi, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *Pareto : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 54–66.
- Jumaidi, A., & Hayati, J. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di D.I. Yogyakarta Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *Tirtayasa Ekonomika*, 17.
- Kristanto, Prabowo Dwi. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012*. Universitas Diponegoro.
- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., Layuck, I. A. C., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). *Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Di Kota Manado*.
- Marginingsih R. (2011). *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zis Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin*. Universitas Diponegoro.
- Noreen, A. (2020). *Analisis Pengaruh Faktor Pdrb, Jumlah Penduduk, Inflasi, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2018*. Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, W. (2012). *Analisis Pengaruh Pdrb, Agrishare, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Skripsi*. Universitas Diponegoro.

- Pratomo, D. S. , & Saputra, P. M. A. (2011). Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan Uud 1945. *Journal Of Indonesian Applied Economics*, 5(2).
- Rahmawati, Diynna, & Sebayang, Asnita Frida. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Ekstrem. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 93–100. <https://doi.org/10.29313/Jrieb.V3i2.2871>
- Salsabila, S. I., Nabila, S., Rianti, R. A., Priyoga, D., & Sujianto, A. E. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022. *Journal Of Administrative And Social Science*, 5(1).
- Silaban, P. S. M. J. Et All. (2020). The Pengaruh Ipm Dan Pdrb Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara Tahun 2002-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 311–321. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V4i1.288>
- Simbolon, R., Rotinsulu, T. O., & Sumual, J. I. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(4).
- Tampubolon, R. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Upahminimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000 – 2019*. Universitas Hkbp Nommensen.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Ed.). Pearson.
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 28(2). <https://doi.org/10.20473/Jeba.V28i22018.5822>
- Yudhistiara, S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2020*. Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Data Penelitian

Provinsi	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	UMP	Inflasi	TPT	DUMMY	PDRB
Banten	2010	751,0	955.300	4,43	13,68	1	271.465.283,23
Banten	2011	690,9	1.000.000	4,84	13,06	1	290.545.838,90
Banten	2012	642,9	1.040.000	4,14	10,13	1	310.385.592,44
Banten	2013	677,5	1.170.000	8,05	9,90	1	331.099.105,50
Banten	2014	649,2	1.325.000	8,44	9,07	1	349.584.667,76
Banten	2015	702,4	1.600.000	7,62	9,55	1	369.209.288,06
Banten	2016	658,1	1.784.000	3,96	8,92	1	389.543.932,29
Banten	2017	675,0	1.931.180	3,94	9,28	1	412.639.618,30
Banten	2018	661,4	2.099.385	3,44	8,47	1	436.581.428,06
Banten	2019	654,5	2.267.990	3,50	8,11	1	459.666.415,79
Banten	2020	776,0	2.460.996	2,22	10,64	0	444.265.085,76
Banten	2021	867,2	2.460.996	1,41	8,98	0	463.472.925,94
Banten	2022	814,0	2.501.203	4,23	8,09	1	487.676.067,09
Banten	2023	826,1	2.661.280	3,44	7,52	1	511.804.653,01
Jawa Barat	2010	4.716,8	671.500	4,72	10,33	1	906.685,76
Jawa Barat	2011	4.650,9	732.000	4,54	9,96	1	965.622,06

Jawa Barat	2012	4.430,2	780.000	4,05	9,08	1	1.028.409,74
Jawa Barat	2013	4.375,2	850.000	7,44	9,16	1	1.093.543,55
Jawa Barat	2014	4.239,0	1.000.000	5,98	8,45	1	1.149.216,06
Jawa Barat	2015	4.435,7	1.000.000	5,62	8,72	1	1.207.232,34
Jawa Barat	2016	4.224,3	2.250.000	3,09	8,89	1	1.275.619,24
Jawa Barat	2017	4.168,4	1.420.624	3,72	8,22	1	1.343.662,14
Jawa Barat	2018	3.615,8	1.544.361	3,53	8,23	1	1.419.624,14
Jawa Barat	2019	3.399,2	1.668.373	3,27	8,04	1	1.490.959,69
Jawa Barat	2020	3.920,2	1.810.351	2,69	10,46	0	1.453.380,72
Jawa Barat	2021	4.195,3	1.810.351	1,71	9,82	0	1.507.746,39
Jawa Barat	2022	4.071,0	1.841.487	4,32	8,31	1	1.589.984,93
Jawa Barat	2023	3.888,6	1.986.670	3,95	7,44	1	1.669.416,85
jawa tengah	2010	5.217,2	660.000	6,88	6,21	1	623.224.621,33
jawa tengah	2011	5.256,0	675.000	2,68	7,07	1	656.268.129,91
jawa tengah	2012	4.863,5	765.000	4,24	5,61	1	691.343.115,96
jawa tengah	2013	4.811,3	830.000	7,99	6,01	1	726.655.118,06
jawa tengah	2014	4.561,8	910.000	8,22	5,68	1	764.959.150,95
jawa tengah	2015	4.577,0	910.000	2,73	4,99	1	806.765.092,17
jawa tengah	2016	4.506,9	993.667	2,36	4,63	1	849.099.354,69
jawa tengah	2017	4.450,7	1.051.381	3,71	4,57	1	893.750.296,17
jawa tengah	2018	3.897,2	1.486.065	2,68	4,47	1	941.091.143,86

jawa tengah	2019	3.743,2	1.605.396	2,81	4,44	1	991.516.543,31
jawa tengah	2020	3.980,9	1.742.015	1,56	6,48	0	965.227.269,21
jawa tengah	2021	4.109,8	1.941.082	1,70	5,95	0	997.321.131,34
jawa tengah	2022	3.831,4	1.812.953	5,63	5,57	1	1.050.278.091,92
jawa tengah	2023	3.791,5	1.958.270	2,89	5,13	1	1.102.563.177,18
jawa timur	2010	5.529,3	630.000	4,88	4,25	1	990.648,80
jawa timur	2011	5.356,2	705.000	5,23	5,33	1	1.054.401,80
jawa timur	2012	5.071,0	745.000	5,64	4,09	1	1.124.464,60
jawa timur	2013	4.771,3	866.250	4,45	4,30	1	1.192.789,80
jawa timur	2014	4.786,8	1.000.000	6,89	4,19	1	1.262.684,50
jawa timur	2015	4.789,1	1.000.000	5,97	4,47	1	1.331.376,10
jawa timur	2016	4.703,3	1.273.490	6,08	4,21	1	1.405.563,50
jawa timur	2017	4.617,0	1.388.000	3,09	4,00	1	1.482.299,60
jawa timur	2018	4.332,6	1.508.895	4,06	3,91	1	1.563.441,80
jawa timur	2019	4.112,3	1.630.590	2,90	3,82	1	1.649.895,60
jawa timur	2020	4.419,1	1.768.777	2,47	5,84	0	1.611.392,60
jawa timur	2021	4.572,7	1.868.777	1,75	5,74	0	1.668.754,40
jawa timur	2022	4.181,3	1.891.567	1,69	5,49	1	1.757.874,90
jawa timur	2023	4.188,8	2.040.244	4,87	4,88	1	1.844.808,70
dki jakarta	2010	388,20	1.118.000	5,23	11,05	1	1.075.183,48
dki jakarta	2011	355,2	1.290.000	5,64	10,80	1	1.147.558,23

dki jakarta	2012	366,3	1.529.150	4,45	9,87	1	1.222.527,92
dki jakarta	2013	371,70	2.200.000	6,89	8,63	1	1.296.694,57
dki jakarta	2014	412,79	2.441.000	5,97	8,47	1	1.373.389,13
dki jakarta	2015	398,92	2.700.000	6,08	7,23	1	1.454.563,85
dki jakarta	2016	384,3	3.100.000	3,09	6,12	1	1.539.916,88
dki jakarta	2017	389,69	3.355.750	4,06	7,14	1	1.635.359,15
dki jakarta	2018	373,12	3.648.036	2,90	6,65	1	1.735.208,29
dki jakarta	2019	365,55	3.940.973	2,47	6,54	1	1.836.240,55
dki jakarta	2020	480,86	4.267.349	1,75	10,95	0	1.792.291,09
dki jakarta	2021	501,92	4.416.186	1,69	8,50	0	1.856.000,69
dki jakarta	2022	502,04	4.641.854	4,87	7,18	1	1.953.488,99
dki jakarta	2023	477,83	4.901.798	4,55	6,53	1	2.050.465,97

Lampiran II. Hasil regresi common effect

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/11/24 Time: 19:03

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50639.00	3500.788	14.46503	0.0000
LOG(UMP)	-2943.928	231.7230	-12.70451	0.0000
INFLASI	-186.7215	69.57741	-2.683651	0.0093
TPT	-416.8870	45.64693	-9.132859	0.0000
LOG(PDRB)	-134.3690	35.85187	-3.747895	0.0004
DUMMY	1283.099	304.6336	4.211941	0.0001
R-squared	0.809207	Mean dependent var		2873.921
Adjusted R-squared	0.794302	S.D. dependent var		1937.577
S.E. of regression	878.681	Akaike info criterion		16.47674
Sum squared resid	49422932	Schwarz criterion		16.66946
Log likelihood	-570.6857	Hannan-Quinn criter.		16.55329
F-statistic	54.28859	Durbin-Watson stat		0.605014
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran III. Hasil regresi fixed effect

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/11/24 Time: 19:03

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37785.20	7266.953	5.199593	0.0000
LOG(UMP)	15.84319	291.4144	0.054367	0.9568
INFLASI	-13.60879	20.71721	-0.656884	0.5138
TPT	-138.7372	35.38295	-3.921018	0.0002
LOG(PDRB)	-2061.309	641.6270	-3.212629	0.0021
DUMMY	359.7072	105.6136	3.405881	0.0012

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986037	Mean dependent var	2873.921
Adjusted R-squared	0.983943	S.D. dependent var	1937.577
S.E. of regression	245.5238	Akaike info criterion	13.97623
Sum squared resid	3616917	Schwarz criterion	14.29744
Log likelihood	-479.1680	Hannan-Quinn criter.	14.10382
F-statistic	470.7938	Durbin-Watson stat	0.827285
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran IV. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

	Statistic	d.f.	Prob.
Effects			
Cross-section F	189.965744	(4,60)	0.0000
Cross-section Chi-square	183.035486	4	0.0000

Lampiran V. Deskriptif data penelitian

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. deviasi
Jumlah penduduk miskin	2873.92	3908.700	5529.300	355.2000	1937.577
UMP	1769008.	1602698.	4901798.	630000.	1007243.
INFLASI	4.256738	4.063333	8.435000	1.409167	1.804805
TPT	7.392857	7.335000	13.68000	3.820000	2.359970
PDRB	2.52E+08	1746542.	1.10E+09	906685.	3.51E+08
DUMMY	0.214286	0.000000	1.000000	0.000000	0.413289

